

PERAN DINAS KESEHATAN DALAM PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jenny Kharisa

NPP. 32.1021

Asdaf Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: jennykharisa13@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Herson Simbolon, S.H., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Stunting is a chronic nutritional problem that has a significant impact on child development and the quality of future human resources. East Kotawaringin Regency is listed as one of the areas with the highest prevalence of stunting in Central Kalimantan, although there have been fluctuations in the decline and increase in stunting rates from year to year. This problem is the main focus of the local government, especially the Health Office as the implementer of policies in the health sector. **Purpose:** This study aims to analyze the role of the Health Office in reducing stunting, identify inhibiting factors, and evaluate the efforts that have been made in East Kotawaringin Regency. **Method:** The approach used was descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. This research uses Jim Ife and Frank Tesoriero's role theory, which includes facilitative, educative, representational, and technical roles as an analytical framework in understanding the implementation of the Health Office's functions. **Result:** The results showed that the Health Office has run various programs such as supplementary feeding, nutrition counseling, and the implementation of the Rembuk Stunting program as part of the national convergence action. However, the effectiveness of these efforts still faces obstacles, including limited health facilities, low public awareness, and geographical barriers. **Conclusion:** The conclusion of this study shows that although the Health Office has a significant role in stunting reduction efforts, it is necessary to strengthen cross-sector coordination, improve community education, and equalize access to health services to achieve optimal results.

Keywords: Role, Health Office, Stunting, Nutrition, East Kotawaringin Regency

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Stunting merupakan masalah gizi kronis yang berdampak signifikan terhadap tumbuh kembang anak dan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kabupaten Kotawaringin Timur tercatat sebagai salah satu daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Kalimantan Tengah, meskipun telah terjadi fluktuasi penurunan dan peningkatan angka stunting dari tahun ke tahun. Permasalahan ini menjadi fokus utama pemerintah daerah, khususnya Dinas Kesehatan sebagai pelaksana kebijakan di bidang kesehatan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kesehatan dalam penurunan stunting, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta mengevaluasi upaya yang telah dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur. **Metode:** Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori peran dari Jim Ife dan Frank Tesoriero, yang mencakup peran fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis sebagai kerangka analisis dalam memahami pelaksanaan fungsi Dinas Kesehatan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan telah menjalankan berbagai program

seperti pemberian makanan tambahan, penyuluhan gizi, dan pelaksanaan program Rembuk Stunting sebagai bagian dari aksi konvergensi nasional. Namun, efektivitas upaya tersebut masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan fasilitas kesehatan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta hambatan geografis. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Dinas Kesehatan memiliki peran yang signifikan dalam upaya penurunan stunting, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan edukasi masyarakat, dan pemerataan akses layanan kesehatan untuk mencapai hasil yang optimal.

Kata kunci: Peran, Dinas Kesehatan, Stunting, Gizi, Kabupaten Kotawaringin Timur

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi kronis yang masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Kondisi ini ditandai dengan gangguan pertumbuhan fisik anak, yakni tinggi badan yang tidak sesuai dengan usia, sebagai akibat dari kekurangan gizi yang berlangsung dalam waktu lama, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020, stunting didefinisikan sebagai tinggi badan menurut umur (TB/U) di bawah -2 SD. Studi oleh Victora *et al.* (2021) menegaskan bahwa stunting pada usia dini berdampak jangka panjang terhadap fungsi otak, status kesehatan, dan potensi ekonomi anak di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya isu kesehatan, melainkan juga tantangan pembangunan berkelanjutan.

Permasalahan stunting telah terbukti menghambat pembangunan kualitas sumber daya manusia karena berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, imunitas tubuh, dan produktivitas jangka panjang. Menurut Bhutta *et al.* (2020), intervensi gizi terpadu selama periode 1.000 HPK berperan krusial dalam mencegah terjadinya stunting. Oleh karena itu, Indonesia menetapkan target nasional penurunan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, Hamid (2018) menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan program pusat di daerah sangat ditentukan oleh kapasitas teknis dan komitmen kelembagaan pemerintah daerah dalam manajemen pelayanan publik.

Kabupaten Kotawaringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting mencapai 32,5% pada tahun 2021, menurun menjadi 27,9% pada tahun 2022, namun kembali meningkat menjadi 35,5% pada tahun 2023. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan intervensi, penurunan stunting belum berjalan optimal. Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Danaei *et al.* (2016) menyatakan bahwa keberhasilan intervensi sangat dipengaruhi oleh pemerataan akses layanan dasar, kapasitas daerah, dan keterlibatan multisektor secara konsisten.

Tantangan dalam penanganan stunting di tingkat daerah juga diperkuat oleh hasil studi yang menunjukkan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektor dan keberfungsian kelembagaan lokal. Menurut Prabowo & Setyawan (2022), rendahnya efektivitas pelaksanaan program di daerah disebabkan oleh lemahnya kolaborasi antarinstansi dan belum optimalnya pemanfaatan data stunting. Sementara itu, Black *et al.* (2013) menekankan pentingnya pendekatan multisektor yang terintegrasi antara kesehatan, sanitasi, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk menurunkan angka stunting secara berkelanjutan di negara berkembang.

Sebagai instansi teknis, Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki peran strategis dalam penurunan stunting melalui fasilitasi program, edukasi masyarakat, pemberian

makanan tambahan, dan koordinasi lintas sektor. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan sarana kesehatan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan tantangan geografis daerah terpencil. Menurut World Health Organization (2020), hambatan geografis, ketersediaan sumber daya, dan rendahnya literasi gizi masyarakat adalah faktor struktural yang sering menyebabkan intervensi stunting tidak mencapai hasil optimal, khususnya di wilayah rural atau tertinggal.

Mengacu pada teori Ife & Tesoriero (2016), peran kelembagaan pemerintah daerah dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yakni peran fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. Kerangka ini penting untuk menganalisis efektivitas Dinas Kesehatan dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak program penurunan stunting secara menyeluruh. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penurunan stunting, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan strategi yang telah dilakukan agar program tersebut memberikan dampak berkelanjutan bagi kualitas kesehatan masyarakat daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah utama mengenai bagaimana peran Dinas Kesehatan dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur, apa saja faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan peran tersebut, serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan dalam penurunan prevalensi stunting. Permasalahan ini menjadi penting karena meskipun pemerintah daerah telah mengadopsi kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 dan mengimplementasikan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting, angka stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur masih tergolong tinggi dan fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal efektivitas peran kelembagaan di tingkat daerah.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) terlihat dari keterbatasan studi sebelumnya yang umumnya hanya mengkaji strategi makro atau kebijakan penanggulangan stunting secara umum, tanpa memfokuskan pada analisis mendalam terhadap peran Dinas Kesehatan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program di lapangan. Misalnya, penelitian oleh Wiguna dkk. (2021) di Kabupaten Sukabumi hanya membahas implementasi kebijakan secara keseluruhan menggunakan model Van Metter dan Van Horn, sedangkan penelitian oleh Sahroji dkk. (2022) di Kabupaten Karawang menekankan pada hambatan koordinasi tanpa mengulas secara sistematis peran-peran kelembagaan. Kedua studi tersebut belum secara spesifik menelaah bagaimana Dinas Kesehatan berperan secara fungsional dan strategis dalam menjalankan kebijakan penurunan stunting.

Selain itu, sebagian besar kajian terdahulu belum menggunakan kerangka teori peran yang komprehensif sebagai alat analisis. Teori peran dari Ife & Frank Tesoriero (2016) yang membagi peran lembaga ke dalam empat kategori (fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis) masih jarang diterapkan dalam konteks penelitian stunting di Indonesia. Padahal, teori ini sangat relevan untuk memahami kompleksitas pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat secara multidimensi, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis dan aksesibilitas yang menantang seperti Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara menyeluruh bagaimana Dinas Kesehatan menjalankan keempat peran tersebut dalam menurunkan angka stunting, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan upaya strategis yang dapat memperkuat efektivitas kebijakan. Temuan dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memperluas khasanah keilmuan dalam bidang administrasi pemerintahan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi masukan praktis bagi

pemerintah daerah dalam menyusun strategi yang lebih adaptif dan terukur dalam penanganan stunting secara berkelanjutan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai stunting telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari kalangan akademisi maupun praktisi di bidang kesehatan masyarakat dan administrasi publik. Namun, fokus dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian-penelitian tersebut masih bervariasi, sehingga terdapat celah untuk dikaji lebih lanjut secara spesifik, khususnya dalam konteks lokal Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini mengkaji peran Dinas Kesehatan secara lebih mendalam berdasarkan teori peran Ife & Tesoriero (2016), serta melihat dinamika pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di daerah dengan karakteristik geografis yang kompleks.

Penelitian pertama dilakukan oleh Azizah, Nastia, dan Sadat (2022) yang berjudul “Strategi Dinas Kesehatan dalam Menekan Laju Penderita Stunting di Kabupaten Buton Selatan”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa strategi lintas sektor yang melibatkan puskesmas, lembaga kemasyarakatan, dan pendidikan mampu menurunkan angka stunting secara signifikan setiap tahun melalui program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Gerakan Masyarakat Peduli Stunting.

Selanjutnya, Wiguna, Meigawati dkk. (2021) melakukan penelitian di Kabupaten Sukabumi dengan fokus pada implementasi kebijakan penanggulangan stunting menggunakan model Van Metter dan Van Horn. Hasilnya menunjukkan bahwa intervensi gizi spesifik dan sensitif serta koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan penurunan angka stunting secara signifikan.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Sahroji, Hidayat dkk. (2022) di Kabupaten Karawang. Penelitian ini menyoroti kendala implementasi kebijakan stunting yang belum optimal, meskipun kegiatan konvergensi telah dilakukan. Beberapa program tidak berjalan dengan baik karena lemahnya koordinasi antarinstansi dan terbatasnya sumber daya.

Penelitian keempat berasal dari jurnal “Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia” oleh Fadillah & Arifin (2021), berjudul “Evaluasi Program Intervensi Gizi dalam Penurunan Stunting di Kabupaten Bone”. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas program PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dan penyuluhan gizi berbasis keluarga. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat dan pelibatan kader posyandu dalam pelaksanaan program.

Penelitian kelima ditulis oleh Lestari & Suprpto (2020) dalam Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas, yang berjudul “Analisis Peran Dinas Kesehatan dalam Konvergensi Program Penurunan Stunting di Kota Semarang”. Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Kesehatan dalam koordinasi lintas sektor sangat krusial untuk memastikan kesinambungan program. Namun, keterbatasan anggaran dan rendahnya kapasitas SDM masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program di tingkat kelurahan.

Kelima penelitian tersebut memberikan dasar konseptual dan empiris dalam memahami upaya penanggulangan stunting. Namun, belum ada yang secara eksplisit menganalisis peran Dinas Kesehatan menggunakan dimensi peran fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis dalam konteks Kabupaten Kotawaringin Timur. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan yang lebih fokus dan lokal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kontribusi kebaruan ilmiah dalam kajian peran kelembagaan, khususnya Dinas Kesehatan, dalam penurunan stunting di tingkat daerah. Kebaruan (*novelty*) terletak pada fokus analisis terhadap implementasi fungsi kelembagaan yang dibedah secara mendalam melalui pendekatan teori peran dari Ife & Tesoriero (2016), yang mencakup empat

kategori peran: fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. Kerangka ini jarang digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, khususnya dalam konteks stunting dan peran pemerintah daerah di Indonesia.

Sebagian besar penelitian terdahulu belum mengkaji peran Dinas Kesehatan secara sistematis berdasarkan dimensi peran kelembagaan tersebut. Misalnya, penelitian oleh Azizah & Nastia (2022) di Kabupaten Buton Selatan lebih menitikberatkan pada strategi lintas sektor dan partisipasi lembaga masyarakat dalam upaya penurunan stunting, tanpa mengevaluasi peran kelembagaan Dinas Kesehatan secara konseptual. Demikian pula, penelitian oleh Wiguna dkk. (2021) di Kabupaten Sukabumi hanya menggunakan model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn, dan tidak membedakan peran kelembagaan dalam pelaksanaan intervensi gizi secara fungsional.

Penelitian oleh Sahroji dkk. (2022) di Kabupaten Karawang mengungkap bahwa implementasi kebijakan belum optimal akibat lemahnya koordinasi dan keterbatasan sumber daya, namun belum menjelaskan bagaimana peran dinas terkait berkontribusi dalam menghadapi hambatan tersebut. Di sisi lain, dua jurnal ilmiah terindeks SINTA yang digunakan sebagai rujukan, yaitu oleh Fadillah & Arifin (2021) di Kabupaten Bone serta Lestari & Suprpto (2020) di Kota Semarang, lebih fokus pada evaluasi efektivitas program intervensi dan sinergi antarinstansi. Namun, keduanya tidak secara eksplisit menggunakan pendekatan teoritis kelembagaan yang sistematis dalam menjelaskan peran Dinas Kesehatan sebagai aktor utama dalam penanggulangan stunting.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena menawarkan pendekatan analitis yang lebih mendalam dan teoritis dalam mengevaluasi peran Dinas Kesehatan berdasarkan tipologi peran yang terukur. Selain itu, konteks geografis Kabupaten Kotawaringin Timur, yang memiliki karakteristik tantangan geografis, sosial, dan administratif tersendiri, memberikan nilai tambah kontekstual yang belum banyak dieksplorasi dalam kajian-kajian sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada aspek teoritis dalam studi administrasi pemerintahan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi rujukan praktis bagi pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan strategi intervensi stunting yang berbasis pada peran institusional yang terstruktur.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Kesehatan dalam penurunan stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan teori Jim Iff dan Frank Tesoriero, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan menjadi rekomendasi praktis bagi kebijakan penanggulangan stunting yang lebih efektif dan kontekstual.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran Dinas Kesehatan dalam penurunan stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggambarkan realitas sosial secara menyeluruh, menelusuri makna dari tindakan kebijakan, serta memahami dinamika implementasi program di tingkat lokal tanpa menggunakan pengukuran statistik. Menurut Nurdin & Hartati (2018), pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami perilaku sosial dalam konteks tertentu secara mendalam dan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pendapat Simangunsong (2019), yang menyatakan bahwa metode kualitatif sangat tepat dalam mengkaji fenomena pemerintahan karena mampu menangkap relasi antaraktor dan proses kebijakan yang kompleks. Moleong (2017) juga menegaskan bahwa pendekatan ini bersifat fleksibel dan interpretatif, sehingga sangat efektif untuk mengeksplorasi makna subjektif yang muncul dari interaksi sosial.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap sumber-sumber resmi seperti peraturan daerah, laporan kegiatan, dan data prevalensi stunting dari Dinas Kesehatan. Kombinasi teknik ini dipilih untuk menjaga validitas dan reliabilitas data melalui proses triangulasi. Putri & Wahyuni (2022) menyatakan bahwa dalam penelitian kebijakan daerah terkait stunting, kombinasi wawancara dan dokumentasi sangat efektif untuk menggambarkan dinamika program secara kontekstual dan akurat.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari pejabat struktural dan pelaksana program di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang terlibat langsung dalam program percepatan penurunan stunting. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Koordinator Program Gizi, karena keduanya memiliki peran strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan terkait stunting.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 6 hingga 25 Januari 2025, bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur, beberapa puskesmas, serta desa-desa lokus stunting yang menjadi target utama intervensi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara dengan pihak terkait, peran Dinas Kesehatan dalam penurunan stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur dianalisis menggunakan teori Jim Ife dan Frank Tesoriero yang membagi peran ke dalam empat dimensi, yaitu fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis.

3.1. Peran Dinas Kesehatan Dalam Penurunan Stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur

Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penurunan stunting berpedoman pada Peraturan Bupati Kotawaringin Timur nomor 22 tahun 2023 tentang percepatan stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk mengetahui peran Dinas Kesehatan dalam penurunan stunting, penulis akan menguraikan empat dimensi dan memiliki indikator pendukung yang saling berhubungan yang dapat dilihat sejauh mana Peran Dinas Kesehatan dalam penurunan stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur.

a. Peran Fasilitatif

Peran fasilitatif Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur terlihat dari kemampuannya dalam mendukung dan mempermudah pelaksanaan berbagai program penurunan stunting di tingkat daerah. Salah satu bentuk konkret dari peran ini adalah penyediaan makanan tambahan bergizi seperti telur dan susu kepada balita stunting, yang didistribusikan melalui puskesmas di 17 kecamatan. Dinas Kesehatan juga menginisiasi kegiatan seperti Grebek Stunting yang melibatkan pemeriksaan tumbuh kembang anak secara massal dan pemberian layanan kesehatan terpadu di wilayah prioritas.

Selain dukungan logistik, Dinas Kesehatan turut memfasilitasi koordinasi lintas sektor dan lintas jenjang pemerintahan, termasuk menjalin kemitraan dengan sektor swasta seperti PT. United Tractors dalam pelaksanaan program CSR di bidang kesehatan. Peran ini memperlihatkan fungsi fasilitatif sebagai jembatan antara kebijakan dan implementasi, serta memperkuat kolaborasi yang menyeluruh dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dinas Kesehatan juga berperan dalam memastikan setiap desa memiliki akses terhadap informasi dan pendampingan melalui kegiatan supervisi lapangan secara berkala.

Lebih lanjut, dukungan juga diberikan dalam bentuk penguatan kapasitas kader dan petugas puskesmas melalui pelatihan, serta pemanfaatan aplikasi elektronik seperti E-PPGBM untuk pelaporan data gizi balita secara real-time. Dengan adanya data yang

valid, intervensi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Seluruh bentuk fasilitasi ini menegaskan bahwa Dinas Kesehatan tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penghubung dan pendukung utama yang memastikan program berjalan secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan di lapangan.

b. Peran Edukasi

Peran edukasi Dinas Kesehatan diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, pola makan sehat, serta pencegahan stunting sejak dini. Penyuluhan dilakukan secara langsung di posyandu, sekolah, dan melalui media sosial resmi Dinas Kesehatan. Edukasi ini ditujukan tidak hanya kepada ibu hamil dan ibu balita, tetapi juga kepada remaja putri agar memiliki pengetahuan yang cukup dalam mempersiapkan masa kehamilan.

Dinas Kesehatan juga mengadakan pelatihan memasak menu bergizi seimbang kepada kader kesehatan dan masyarakat di desa-desa lokus stunting. Hal ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dari sisi konsumsi pangan di tingkat rumah tangga. Dalam praktiknya, edukasi ini dilaksanakan secara partisipatif agar masyarakat merasa terlibat dan memiliki kepedulian terhadap tumbuh kembang anak.

Melalui pendekatan edukatif ini, Dinas Kesehatan berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat agar memahami bahwa stunting bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga masalah pengetahuan, pola asuh, dan kebiasaan sehari-hari. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat diharapkan mampu melakukan pencegahan secara mandiri dan berkelanjutan.

c. Peran Representasional

Peran representasional dijalankan Dinas Kesehatan melalui keterlibatannya dalam berbagai forum koordinasi dan advokasi lintas sektor, seperti kegiatan Rembuk Stunting yang melibatkan pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan mitra pembangunan. Dinas Kesehatan bertindak sebagai perwakilan sektor kesehatan dalam merumuskan program, menyuarakan kebutuhan teknis lapangan, serta memperjuangkan anggaran untuk kegiatan intervensi stunting.

Selain itu, peran ini tampak dalam hubungan kemitraan dengan sektor swasta, seperti kerja sama dengan perusahaan melalui program Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang mendukung penyediaan makanan tambahan bagi balita. Keterlibatan Dinas Kesehatan dalam jejaring kemitraan tersebut memperkuat posisi institusi sebagai aktor yang mewakili kepentingan kesehatan masyarakat secara luas.

Melalui peran representasional ini, Dinas Kesehatan tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga penghubung strategis antara kepentingan masyarakat dengan pengambil kebijakan, serta menjembatani kolaborasi lintas sektor demi tercapainya tujuan penurunan stunting secara terpadu.

d. Peran Teknis

Peran teknis Dinas Kesehatan mencakup pelaksanaan layanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam hal pengukuran status gizi balita, pemantauan pertumbuhan anak, serta penanganan kasus stunting yang telah teridentifikasi. Dinas Kesehatan memastikan bahwa seluruh puskesmas melaksanakan program intervensi gizi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, termasuk distribusi PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dan vitamin A.

Selain pelayanan langsung, Dinas Kesehatan juga menjalankan fungsi teknis dalam perencanaan dan evaluasi program, seperti analisis data E-PPGBM, pemetaan lokus prioritas, serta pengembangan indikator program yang digunakan dalam evaluasi

capaian. Kegiatan supervisi dan monitoring lapangan secara berkala menjadi bagian penting dari peran teknis untuk menjaga mutu pelaksanaan.

Peran teknis ini menjadi dasar pelaksanaan seluruh strategi penurunan stunting yang bersifat praktis dan berbasis data. Dengan dukungan tenaga kesehatan, alat ukur yang akurat, dan sistem informasi yang terintegrasi, Dinas Kesehatan memastikan bahwa intervensi dilakukan tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap perbaikan status gizi anak di Kabupaten Kotawaringin Timur.

3.2. Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Peran Dinas Kesehatan dalam Penurunan Stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur

Terdapat dua faktor utama yang menghambat efektivitas peran Dinas Kesehatan dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur, yaitu keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan serta rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pola asuh anak.

a. Akses Terbatas terhadap Layanan Kesehatan

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan peran Dinas Kesehatan adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil dan pedalaman. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kondisi geografis yang cukup menantang, seperti jauhnya jarak antarwilayah, infrastruktur jalan yang belum merata, dan keterbatasan moda transportasi. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk menjangkau fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan posyandu secara rutin. Akibatnya, kegiatan penting seperti pemantauan pertumbuhan anak, imunisasi, dan intervensi gizi sering tidak terlaksana secara optimal.

Selain faktor geografis, hambatan juga muncul dari keterbatasan sumber daya kesehatan di tingkat fasilitas. Masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan, terutama ahli gizi dan bidan, serta kurangnya alat kesehatan dan logistik yang memadai. Beberapa puskesmas juga belum memiliki sarana yang memadai untuk menangani balita dengan status gizi buruk atau stunting. Kondisi ini memperlemah efektivitas pelaksanaan program penurunan stunting meskipun kebijakan dan program sudah dirancang secara komprehensif. Dengan keterbatasan akses ini, masyarakat di daerah tertinggal menjadi kelompok yang paling rentan dan sulit dijangkau oleh intervensi kesehatan.

b. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat dalam Pola Asuh

Faktor lain yang menjadi penghambat adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pola asuh anak yang tepat, khususnya terkait gizi, kebersihan, dan kesehatan lingkungan. Banyak orang tua, terutama di kalangan masyarakat berpendidikan rendah, belum memahami pentingnya pemenuhan gizi seimbang sejak masa kehamilan hingga usia balita. Kesalahan umum seperti pemberian makanan instan, tidak sesuai usia, atau kurangnya variasi makanan bergizi masih banyak ditemukan. Kurangnya pengetahuan ini membuat masyarakat belum memiliki kesadaran yang cukup untuk mencegah stunting sejak dini.

Selain itu, pola asuh yang tidak mendukung tumbuh kembang anak juga terlihat dari masih rendahnya kepedulian terhadap praktik kebersihan, seperti mencuci tangan dengan sabun dan penggunaan air bersih. Meskipun Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya edukasi melalui penyuluhan dan media sosial, perubahan perilaku masyarakat berjalan lambat. Budaya, tingkat ekonomi, dan keterbatasan akses informasi menjadi faktor yang turut mempengaruhi lambatnya transformasi pola pikir. Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi teknis saja tidak cukup, melainkan perlu dibarengi dengan pendekatan edukatif yang berkelanjutan dan partisipatif.

3.3. Upaya Dinas Kesehatan dalam Menurunkan Angka Stunting di Kabupaten Kotawaringin Timur

a. Meningkatkan Kerja Sama dengan Pihak Lain

Salah satu strategi utama yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menurunkan angka stunting adalah dengan memperkuat kerja sama lintas sektor. Kolaborasi ini dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal, melibatkan instansi pemerintah lainnya, sektor swasta, serta lembaga non-pemerintah. Contoh konkret dari kerja sama ini adalah kemitraan dengan PT. United Tractors dalam bentuk program Corporate Social Responsibility (CSR) yang menyediakan makanan tambahan untuk balita. Selain itu, Dinas Kesehatan juga aktif dalam forum Rembuk Stunting yang mempertemukan perangkat daerah, camat, kepala desa, dan mitra pembangunan guna menyusun rencana aksi bersama.

Kerja sama ini bertujuan untuk memperluas cakupan intervensi serta memastikan bahwa program penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata. Dukungan dari lintas sektor, seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta organisasi kemasyarakatan sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam penanganan faktor penyebab stunting yang bersifat multidimensi. Melalui peningkatan kolaborasi ini, program yang dilaksanakan menjadi lebih terintegrasi dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih efektif, terutama di wilayah-wilayah prioritas.

b. Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

Selain memperkuat kerja sama, Dinas Kesehatan juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya preventif dalam menekan angka stunting. Kegiatan ini dilaksanakan melalui berbagai media dan pendekatan langsung seperti penyuluhan di posyandu, sekolah, pengajian, serta pemanfaatan media sosial. Materi edukasi meliputi pentingnya pemenuhan gizi seimbang, perawatan ibu hamil, ASI eksklusif, serta pemantauan tumbuh kembang anak. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menerapkan pola asuh yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Upaya edukasi juga dilakukan dalam bentuk pelatihan bagi kader kesehatan dan tokoh masyarakat agar mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. Dalam beberapa kegiatan, masyarakat dilibatkan dalam simulasi memasak menu sehat bergizi dan pemanfaatan pangan lokal. Melalui edukasi yang konsisten dan berkelanjutan, diharapkan terjadi perubahan perilaku secara bertahap, sehingga masyarakat mampu melakukan pencegahan stunting secara mandiri. Dinas Kesehatan meyakini bahwa membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat adalah kunci utama dalam menciptakan generasi bebas stunting.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki peran penting dalam penurunan angka stunting melalui empat dimensi peran kelembagaan, yaitu peran fasilitatif, edukatif, representasional, dan teknis. Dalam dimensi fasilitatif, Dinas Kesehatan secara aktif menyediakan sarana seperti makanan tambahan bergizi dan mendukung pelaksanaan kegiatan seperti Grebek Stunting. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Fadillah & Arifin (2021) yang juga menemukan bahwa pemberian makanan tambahan dan penyuluhan gizi memiliki dampak signifikan dalam menurunkan angka stunting, khususnya ketika melibatkan partisipasi masyarakat melalui kader posyandu.

Sama halnya dengan temuan penelitian oleh Lestari & Suprpto (2020), penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan program penurunan stunting sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi lintas sektor. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur secara

aktif berperan dalam forum Rembuk Stunting dan menjalin kerja sama dengan sektor swasta seperti PT. United Tractors. Namun, berbeda dengan penelitian Lestari dan Suprpto yang menekankan kendala utama pada aspek kapasitas sumber daya manusia dan anggaran, penelitian ini justru menyoroti hambatan akses geografis dan minimnya kesadaran masyarakat sebagai tantangan utama yang dihadapi.

Dalam aspek edukasi, penelitian ini menemukan bahwa Dinas Kesehatan telah menjalankan program penyuluhan dan pelatihan memasak menu sehat secara langsung ke masyarakat. Temuan ini selaras dengan penelitian Azizah & Nastia (2022) di Kabupaten Buton Selatan yang menunjukkan bahwa pendekatan edukatif mampu mengubah perilaku masyarakat terkait gizi anak. Namun, berbeda dengan penelitian Wiguna dkk. (2021) yang menitikberatkan pada keberhasilan koordinasi dan model implementasi kebijakan, penelitian ini secara khusus menggarisbawahi pentingnya pendekatan edukatif dan teknis yang berkelanjutan untuk mengatasi stunting secara menyeluruh di wilayah pedalaman.

Selain itu, dalam dimensi representasional, penelitian ini mengungkapkan bahwa Dinas Kesehatan memainkan peran penting sebagai perwakilan sektor kesehatan dalam forum perumusan kebijakan daerah. Hal ini sejalan dengan temuan Sahroji dkk. (2022) yang menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memimpin konvergensi program. Namun, penelitian ini menolak sebagian temuan Sahroji dkk. (2022), karena di Kabupaten Kotawaringin Timur, koordinasi yang kuat telah terjalin, sementara penelitian mereka menemukan lemahnya koordinasi sebagai kendala utama.

Akhirnya, dalam dimensi teknis, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai layanan langsung seperti pemantauan tumbuh kembang balita, pendistribusian PMT, dan pelaporan data melalui sistem E-PPGBM. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Fadillah & Arifin (2021) yang menyatakan bahwa keakuratan data dan pelibatan tenaga kesehatan di lapangan berkontribusi besar terhadap keberhasilan intervensi stunting. Namun, temuan ini juga menunjukkan perbedaan dengan penelitian di daerah perkotaan seperti Kota Semarang (Lestari & Suprpto, 2020), di mana akses layanan lebih mudah dan tidak dihadapkan pada tantangan geografis sebagaimana terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang lebih spesifik terhadap pemahaman peran Dinas Kesehatan di wilayah dengan kondisi geografis menantang. Penelitian ini tidak hanya memperkuat hasil-hasil studi sebelumnya, tetapi juga memperkaya perspektif dengan mengkaji secara menyeluruh empat dimensi peran kelembagaan, serta memberikan gambaran implementasi kebijakan dalam konteks daerah terpencil yang belum banyak diteliti secara mendalam.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah pengaruh kuat dari karakter geografis terhadap efektivitas pelaksanaan program stunting. Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang luas dan memiliki banyak daerah terpencil menyulitkan distribusi logistik, supervisi program, hingga akses masyarakat ke layanan kesehatan. Meski telah ada kebijakan konvergensi nasional, keterbatasan infrastruktur seperti jalan rusak, transportasi minim, dan jarak tempuh yang jauh tetap menjadi hambatan nyata dalam implementasi program intervensi gizi. Hal ini menegaskan bahwa upaya teknis dan edukatif saja tidak cukup tanpa dibarengi dukungan infrastruktur dasar yang memadai.

Temuan lain yang cukup menonjol adalah komitmen tinggi dari aparatur Dinas Kesehatan sebagai faktor pendukung utama keberlangsungan program, meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Ketersediaan tenaga kesehatan yang terbatas di beberapa wilayah tidak menghalangi semangat mereka untuk terus melakukan edukasi, pendampingan, dan pemantauan rutin. Kegiatan seperti Grebek Stunting dan pelatihan kader tetap berjalan

dengan melibatkan berbagai pihak secara kolaboratif. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal seperti motivasi dan kepemimpinan dinas sangat berperan dalam menjaga keberlanjutan program.

Selain itu, keterlibatan sektor swasta melalui program CSR juga menjadi temuan yang cukup signifikan, khususnya dalam penyediaan dukungan non-anggaran seperti bantuan makanan tambahan dan fasilitas kesehatan. Kehadiran mitra seperti PT. United Tractors dalam mendukung intervensi stunting menunjukkan bahwa pendekatan multiaktor sangat diperlukan, terutama untuk memperluas jangkauan program ke wilayah yang sulit dijangkau oleh pemerintah daerah. Keterlibatan pihak luar ini menjadi bentuk nyata dari kolaborasi lintas sektor yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi berdampak langsung pada pelaksanaan program di lapangan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur memainkan peran yang penting dalam penurunan angka stunting, yang dianalisis melalui empat dimensi peran kelembagaan menurut teori Jim Ife dan Frank Tesoriero. Pertama, dalam peran fasilitatif, Dinas Kesehatan telah menyediakan dukungan berupa makanan tambahan bergizi, pelaksanaan kegiatan Grebek Stunting, serta menjalin kerja sama lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta. Kedua, dalam peran edukatif, Dinas Kesehatan aktif melakukan penyuluhan, pelatihan kader, serta kampanye gizi kepada masyarakat melalui posyandu, sekolah, dan media sosial.

Ketiga, dalam peran representasional, Dinas Kesehatan mewakili sektor kesehatan dalam forum Rembuk Stunting dan berbagai koordinasi lintas instansi, serta menjembatani kerja sama dengan mitra pembangunan dalam rangka memperkuat konvergensi program. Keempat, dalam peran teknis, Dinas Kesehatan menjalankan layanan pemantauan tumbuh kembang balita, distribusi PMT, pelaporan data melalui E-PPGBM, dan supervisi lapangan secara rutin.

Namun, peran-peran tersebut masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses layanan kesehatan di daerah terpencil serta rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pola asuh dan pemenuhan gizi. Meskipun demikian, terdapat faktor pendukung seperti komitmen petugas kesehatan dan keterlibatan sektor swasta yang mampu memperkuat pelaksanaan program. Oleh karena itu, keberhasilan program penurunan stunting ke depan sangat bergantung pada penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan edukasi berkelanjutan, dan pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan kondisi berbeda. Waktu penelitian yang terbatas juga membatasi kedalaman observasi dan wawancara. Selain itu, pendekatan kualitatif yang digunakan tidak memberikan data kuantitatif terkait efektivitas program secara statistik.

Arah Masa Depan Penelitian: Penelitian selanjutnya disarankan dilakukan di wilayah lain untuk perbandingan, serta menggunakan pendekatan *mixed methods* agar menghasilkan data yang lebih komprehensif. Selain itu, penting untuk mengeksplorasi peran aktor non-pemerintah seperti sektor swasta, masyarakat, dan media dalam mendukung percepatan penurunan stunting secara kolaboratif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur atas dukungan, izin, dan kerja sama yang telah diberikan selama proses pelaksanaan penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam

mendukung perbaikan kebijakan serta penguatan program penurunan stunting di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N., & Nastia, A.S. (2022). Strategi Dinas Kesehatan dalam Menekan Laju Penderitaan Stunting di Kabupaten Buton Selatan. *JIP: Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4145-4152. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i12.1757>
- Bhutta, Z. A., Berkley, J. A., Bandsma, R. H., Kerac, M., Trehan, I., & Briend, A. (2020). Severe Childhood Malnutrition. *The BMJ*, 370, m3068. <https://doi.org/10.1136/bmj.m3068>
- Black, R. E., Victora, C. G., Walker, S. P., et al. (2013). Maternal and Child Undernutrition and Overweight in Low-income and Middle-income Countries. *The Lancet*, 382(9890), 427–451. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(13\)60937-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(13)60937-X)
- Danaei, G., Andrews, K. G., Sudfeld, C. R., Fink, G., McCoy, D. C., Peet, E., ... & Fawzi, W. W. (2016). Risk Factors for Childhood Stunting in 137 Developing Countries: a Comparative Risk Assessment Analysis at Global, Regional, and Country Levels. *PLOS Medicine*, 13(11), e1002164. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002164>
- Fadillah, I., & Arifin, M. (2021). Evaluasi Program Intervensi Gizi dalam Penurunan Stunting di Kabupaten Bone. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 10(3), 137–144. <https://doi.org/10.22146/jkki.63745>
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Sumedang: IPDN.
- Ife, J & Tesoriero, F. (2016). *Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestari, D., & Suprpto, H. (2020). Analisis Peran Dinas Kesehatan dalam Konvergensi Program Penurunan Stunting di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 15(2), 150–158. <https://doi.org/10.25077/jkma.15.2.150-158.2020>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2018). *Modul Perkuliahan Metodologi Penelitian Sosial*. Sumedang: Fakultas Politik Pemerintahan IPDN.
- Prabowo, H., & Setyawan, M. A. (2022). Analisis Implementasi Konvergensi Program Penurunan Stunting di Kabupaten Tegal. *Jurnal BKM Kesehatan Masyarakat*, 8(2), 102–109. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jbkm/article/view/9607>
- Putri, A. P., & Wahyuni, S. (2022). Strategi Dinas Kesehatan dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 11(1), 45–52. <https://doi.org/10.22146/jkki.67796>
- Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 34–39. <https://doi.org/10.31289/jpp.v7i1.6372>
- Simangunsong, F. (2019). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Victora, C. G., Christian, P., Vdaletti, L. P., Gatica-Domínguez, G., Menon, P., & Black, R. E. (2021). Revisiting Maternal and Child Undernutrition in Low-income and Middle-Income Countries: Variables and Pathways. *The Lancet*, 397(10288), 2050–2061. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00394-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00394-9)
- Wiguna, A. R., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humanioramania*, 6(1), 28-36. <https://doi.org/10.31604/muqoddimah.v6i1.2021.28-36>

World Health Organization. (2020). *Improving Nutrition Outcomes with Better Water, Sanitation and Hygiene: Practical Solutions for Policies and Programmes*. Geneva: WHO. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565257>

